



Available online at: <https://intropublica.org/index.php/jadbe>

**Journal of Advances  
in Digital Business and Entrepreneurship**

ISSN (Online) 2964-8777

JOURNAL OF ADVANCES  
IN DIGITAL BUSINESS AND  
ENTREPRENEURSHIP

## PENGARUH TANGGUNG JAWAB SOSIAL, UKURAN PERUSAHAAN, KOMPENSASI RUGI FISKAL, INVENTORY INTENSITY, KONEKSI POLITIK TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Hidayatul Fitriyah

Wawan Andang Saputra

University of Esa Unggul, Jakarta, Indonesia

Corresponding Author: [hidayatulfitriyah57@gmail.com](mailto:hidayatulfitriyah57@gmail.com)

### ARTICLE INFORMATION

Received: March 01, 2024

Revised: March 04, 2024

Accepted: March 07, 2024

### KEYWORDS

social responsibility, company size, fiscal loss compensation, inventory intensity, political connections, tax avoidance

### A B S T R A C T

*This research aims to determine the relationship between social responsibility, company size, fiscal loss compensation, inventory intensity, and political connections on tax avoidance in coal mining sub sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2018-2022. The population in this study was 34, using purposive sampling techniques, a total sample of 22 companies was obtained with an observation period of 5 years, so there were 110 research data obtained from financial and annual reports of coal mining subsector companies on the Indonesia Stock Exchange during period 2018-2022. This type of research uses an explanatory causality research design which discusses cause and effect. This research uses multiple linear regression data analysis methods. Based on data processing, the results show that social responsibility has a positive effect on tax avoidance. Political connections have a positive effect on tax evasion. Meanwhile, company size has no effect on tax avoidance. Fiscal loss compensation has no effect on tax avoidance. Inventory intensity has no effect on tax avoidance. Apart from that, the research results state that simultaneously the variables social responsibility, company size, fiscal loss compensation, inventory intensity, and political connections affect tax avoidance.*

### 1. Pendahuluan

Indonesia, dengan potensi sumber daya yang melimpah, memandang industri pertambangan batu bara sebagai salah satu sektor sumber daya utama yang memberikan kontribusi signifikan pada pendapatan negara setiap tahunnya. Keberlimpahan sumber daya energi mineral di negara ini menjadi daya tarik bagi para investor yang tertarik untuk mengelola dan memanfaatkan potensi ini. Dengan demikian, peran industri pertambangan di Indonesia menjadi krusial dalam mendorong kemajuan ekonomi masyarakat. Pendapatan yang dihasilkan dari sektor ini diharapkan dapat diperuntukkan untuk memajukan aspek-aspek penting seperti ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Febrian et al., 2023). Pertumbuhan pendapatan negara memiliki dampak signifikan terhadap penerimaan keuangan negara. Jika dibandingkan

dengan sektor-sektor lain yang bergantung pada kontribusi individu wajib pajak, sektor pajak secara signifikan menjadi penyumbang terbesar terhadap pendapatan negara (Putri et al., 2019).

Pendapatan yang diterima akan digunakan untuk kepentingan pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat. Berbagai cara dilakukan untuk mencapai target APBN. Pasal 5 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 menetapkan penurunan tarif Pajak Penghasilan Badan menjadi 22% yang akan diterapkan selama periode tersebut (Kementerian Republik Indonesia, 2020). Dengan mengubah tarif pajak penghasilan, pemerintah berharap wajib pajak badan akan lebih rajin membayar pajak, meningkatkan penerimaan pajak dan mengurangi penghindaran pajak.

Perusahaan yang mengelola pajak secara efektif diharapkan memiliki informasi akuntansi secara transparan, mengurangi asimetri informasi dan menciptakan kepercayaan sosial bahwa membayar pajak secara adil serta menghindari tax avoidance (Lee et al., 2021). Penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, termasuk akan menimbulkan kerugian bagi pendapatan negara dan perusahaan, karena pajak salah satu sumber pendapatan negara yang akan dijadikan sumber pembiayaan pengeluaran negara, jika banyak perusahaan melakukan penghindaran pajak, sehingga pendapatan negara yang bersumber dari pajak akan terpengaruh, selain itu, penghindaran pajak akan berdampak buruk terhadap reputasi suatu perusahaan (Sihono & Febyansyah, 2023). Jumlah pajak yang wajib dibayarkan perusahaan kepada negara bergantung pada besarnya profit yang dihasilkan Perusahaan tersebut pada jangka waktu satu periode (Anggraini & Wahyudi, 2022).

Selain itu, terdapat pengeluaran tanggung jawab sosial yang juga dapat dilakukan sebagai cara penghindaran pajak, aktivitas tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan akan membutuhkan biaya, yang mengakibatkan keuntungan perusahaan berkurang, perusahaan cenderung melakukan aktivitas CSR, di samping untuk meningkatkan citra perusahaan, juga untuk memperkecil laba, sehingga beban pajaknya berkurang (Firmansyah & Estutik, 2020).

Faktor kedua perusahaan dengan ukuran perusahaan yang tinggi cenderung semakin kompleks transaksi yang dapat dilakukannya. Hal tersebut memungkinkan perusahaan memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan tax avoidance di setiap transaksi. Selain itu ukuran perusahaan yang besar lebih mampu dalam menggunakan sumber daya yang dimilikinya dalam hal membuat perencanaan pajak yang baik (Agatha & Putra, 2022). Faktor ketiga yang mempengaruhi penghindaran pajak terdapat kompensasi kerugian fiskal, perusahaan yang mengalami kerugian pada periode tertentu dapat meminimalkan beban pajak pada periode berikutnya. Dapat mengkompensasikan kerugian perusahaan dengan laba selama lima tahun berikutnya, sehingga pajak yang harus dibayarkan dapat dikurangi karena jumlah laba yang terutang berkurang (Mulyati et al., 2019).

Selain kompensasi rugi fiskal, inventory intensity juga digunakan sebagai faktor yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak, inventory intensity suatu ukuran seberapa besar persediaan yang diinvestasikan oleh perusahaan. Dalam PSAK 14 tentang persediaan, mengatur biaya yang timbul akibat kepemilikan persediaan yang tinggi harus dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui pada biaya dalam periode terjadinya biaya. Dengan besarnya biaya tambahan yang muncul dalam pemeliharaan, penyimpanan, kerusakan dan perawatan persediaan maka biaya yang timbul dapat menunda pembayaran pajaknya, maka hal ini bisa dikatakan perusahaan berusaha melakukan penghindaran pajak (Handayani & Ivena, 2022).

Faktor kelima koneksi politik juga digunakan sebagai faktor yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak dari suatu perusahaan, dimana koneksi politik secara realistis dilakukan dengan menunjuk pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan pemerintah dilihat pada struktur organisasi perusahaan, baik sebagai komisaris maupun partai, direksi dengan adanya koneksi politik yang kuat, suatu perusahaan akan mendapatkan kemudahan dalam mengajukan pinjaman bank, dikecualikan dari audit pajak pemerintah (Firmansyah et al., 2022).

Berdasarkan hasil penelitian (López-González et al., 2019) yang berjudul *Does Corporate Social Responsibility affect and Tax Avoidance? Evidence from Family Firms* yang digunakan sebagai jurnal referensi untuk penelitian ini menyatakan bahwa bagaimana cara perusahaan melakukan penghindaran pajak. Kepemilikan keluarga memengaruhi strategi penghematan pajak dengan tanggung jawab sosial. Perusahaan menghindari tindakan apapun yang dapat merusak reputasi, citra, kinerja perusahaan, hidup, dan diwariskan kepada keturunannya, namun bukti ini berbanding terbalik. Padahal penggunaan penghindaran pajak, meskipun metode ini menghasilkan potensi yang tinggi, perusahaan keluarga lebih memilih hal tersebut menggunakan aktivitas penghindaran untuk menutupi kerugian perusahaan berdasarkan sampel internasional dalam perilaku penghindaran pajak maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang tanggung jawab sosial, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, inventory intensity dan koneksi politik subsektor pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 2018- 2022, dan memberikan bukti penelitian yang mendukung atau menentang

hipotesis. Namun, subsektor ini tetap bertahan dan stabil. Selain itu, subsektor pertambangan batubara ini juga sangat penting bagi pendapatan negara.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fiskus yang menggunakan celah dalam peraturan perpajakan untuk melakukan hal-hal yang dapat merugikan pemerintah, meskipun praktik penghindaran pajak tidak ilegal namun praktik ini dapat merugikan perekonomian Indonesia mengingat pajak salah satu kontribusi terbesar dalam perekonomian negara adanya hasil penelitian sebelumnya yang berbeda beda, oleh karena itu penelitian ini akan membahas lebih dalam mengenai penghindaran pajak dalam perusahaan pertambangan batu bara.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan diatas, Studi ini memberikan analisis dan bukti tentang berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan penghindaran pajak perusahaan yang memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh tanggung jawab sosial, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, inventory intensity, dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan batu bara periode selama 2018-2022.

## 2. Tinjauan Pustaka

### **Pengaruh Tanggung Jawab Sosial, inventory intensity, Ukuran Perusahaan, kompensasi Rugi Fiskal, dan Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak**

Aktivitas penghindaran pajak pada suatu perusahaan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pada penelitian ini penghindaran pajak dipengaruhi oleh tanggung jawab sosial, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, inventory intensity, dan koneksi politik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan berbagai cara macam tujuan. Penghindaran pajak dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memperkecil besarnya tingkat pembayaran pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan yang dapat akan mengurangi pendapatan negara.

Pengeluaran biaya untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial dan pajak akan mengurangi laba atau pendapatan perusahaan, dan hal ini akan mengganggu aktivitas perusahaan di kemudian hari jika laba yang diperoleh belum mencapai target yang direncanakan, Untuk memaksimalkan keuntungan dan pendapatannya, perusahaan berusaha mengurangi biaya pajak dengan menghindari pajak dengan menggunakan biaya pengungkapan tanggung jawab sosial (Zeng, 2019). Dimana ukuran perusahaan yang diukur dengan total aset sebagai salah satu aset industri yang mana melalui terdapatnya kekayaan yang kian besar bisa menandakan keterampilan industri agar bertumbuh serta mengalami perkembangan pun kian tinggi (Mulyati et al., 2019).

Inventory intensity besarnya intensitas persediaan dapat menimbulkan biaya tambahan, seperti biaya perawatan, dan biaya penyimpanan. Biaya tambahan yang besar akan menyebabkan penurunan laba perusahaan (Nugrahadi & Rinaldi, 2021). Kompensasi rugi fiskal dapat menjadi alat yang berguna untuk mengurangi pajak. Ketika sebuah perusahaan mengalami kerugian dalam suatu periode, perusahaan dapat mencatat kerugian tersebut sebagai rugi fiskal, yang selanjutnya dapat digunakan untuk mengimbangi keuntungan dimasa depan. Dengan cara ini, perusahaan dapat mengurangi pendapatan kena pajak dan akibatnya mengurangi kewajiban pajak perusahaan (Lestari & Solikhah, 2019).

Koneksi politik yang dimiliki oleh Perusahaan dapat melindungi perusahaan dari resiko deteksi tindakan pajak agresif yang dilakukan. Adanya koneksi politik dapat mengecilkan jumlah pajak dan mendapatkan informasi regulasi pajak. Perusahaan yang memiliki tingkat intensitas persediaan tinggi maka dalam melakukan koneksi politik juga tinggi agar mendapatkan perlindungan dari risiko deteksi penghindaran pajak yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak yang terkait didalam koneksi politik (Fadillah & Lingga, 2021). Penelitian (Alsmady, 2023) menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial, ukuran perusahaan, inventory intensity, kompensasi rugi fiskal, koneksi politik secara simultan berhubungan positif dengan penghindaran pajak. Hal ini sejalan oleh, (López-González et al., 2019) penghindaran pajak upaya mengurangi beban pajak secara legal sehingga tidak dianggap merugikan pihak perusahaan. mengevaluasi temuan dari berbagai penelitian yang telah disebutkan sebelumnya. Dengan demikian, hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

**H1:** Tanggung Jawab Sosial, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, Inventory Intensity, dan koneksi politik secara simultan berpengaruh positif dengan Penghindaran pajak

### **Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Terhadap Penghindaran pajak**

Tindakan penghindaran pajak yang dijalankan perusahaan dapat mengakibatkan berkurangnya penerimaan negara, dengan menjalankan kegiatan pengungkapan tanggung jawab sosial maka biaya-biaya yang dikeluarkan akan mengurangi laba perusahaan, yang menyebabkan pada kecilnya beban pajak yang

dibayarkan perusahaan. Membayar pajak salah satu cara perusahaan bertanggung jawab kepada lingkungan sosial, (López-González et al., 2019). Dengan membayar pajak dengan penuh kesadaran dan sesuai dengan nominal yang ditetapkan, perusahaan juga telah membina hubungan yang baik dengan pemerintah. Selain itu, perusahaan yang melaksanakan tanggung jawab sosial cenderung menjadi perhatian publik. Akibat aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, maka perusahaan tersebut memiliki lebih berisiko karena berpengaruh buruk pada citra perusahaan (Zeng, 2019) hal ini sejalan dengan teori stakeholder, aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan tidak hanya memengaruhi kepentingan perusahaan itu sendiri. Namun juga mempengaruhi pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholder yang terkena dampak aktivitas perusahaan tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh (Zeng, 2019) menyatakan bahwa tanggung jawab sosial berpengaruh positif (Gulzar et al., 2018) dan (López-González et al., 2019) terhadap penghindaran pajak. Hal ini tidak sejalan (Goerke, 2019) penelitian ini menyatakan bahwa tanggung jawab sosial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini sebagai berikut:

**H2:** Tanggung Jawab Sosial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

### **Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran pajak**

Ukuran perusahaan menunjukkan seberapa besar perusahaan dan sekaligus mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki. Perusahaan yang memiliki aset yang besar cenderung lebih mampu dan stabil untuk menghasilkan laba jika dibandingkan perusahaan yang total aset kecil jadi laba yang besar dan stabil akan cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (Irawan, 2020). Berdasarkan teori agensi, sumber daya yang dimiliki oleh Perusahaan dapat digunakan oleh agent untuk memaksimalkan kinerja perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mulyati et al., 2019) dan (Irawan, 2020) yang mengemukakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

**H3:** Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

### **Pengaruh kompensasi rugi fiskal Terhadap Penghindaran pajak**

Secara logika perusahaan yang telah merugi dalam satu periode akuntansi diberikan keringanan untuk membayar pajaknya. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan selama lima tahun ke depan dan laba perusahaan akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian tersebut (Lestari & Solikhah, 2019). Akibatnya, selama lima tahun tersebut, perusahaan akan terhindar dari beban pajak, karena laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian perusahaan. Berdasarkan teori agensi, pihak manajemen perusahaan sebagai agent tentunya akan memanfaatkan adanya insentif pajak berupa kompensasi dari kerugian fiskal pada tahun sebelumnya, karena dengan adanya kompensasi tersebut pasti akan menekan beban pajak dan laba setelah pajak pada tahun tersebut akan lebih tinggi (Septanta, 2023) menyatakan kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif bagi penghindaran pajak. Hal ini sejalan oleh (Septanta, 2023) yang menyatakan kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif bagi penghindaran pajak.

**H4:** Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

### **Pengaruh Inventory Intensity Terhadap penghindaran pajak.**

Inventory intensity mengukur seberapa banyak persediaan yang diinvestasikan oleh perusahaan (Alsmady, 2023). Dalam investasi ini menyebabkan terbentuknya biaya pemeliharaan dan penyimpanan atas persediaan sehingga mengakibatkan beban perusahaan akan meningkat dan dapat menurunkan laba, adanya peningkatan pada beban perusahaan maka akan berpengaruh sebagai pengurang beban pajak. Hal ini sesuai dengan teori keagenan yang menyatakan manajer akan berusaha mengurangi beban tambahan yang disebabkan oleh banyaknya stok agar keuntungan perusahaan tidak turun. Jika keuntungan perusahaan turun, pajak yang dibayarkan perusahaan juga akan turun

Hipotesis penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu sejalan (Ahdiyah & Triyanto, 2021) berhasil membuktikan bahwa inventory intensity berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dikarenakan semakin tinggi inventory intensity suatu perusahaan maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak perusahaan tersebut. Meneliti temuan dari berbagai studi yang disebutkan sebelumnya. Oleh karena itu, hipotesis yang digunakan penelitian ini sebagai berikut:

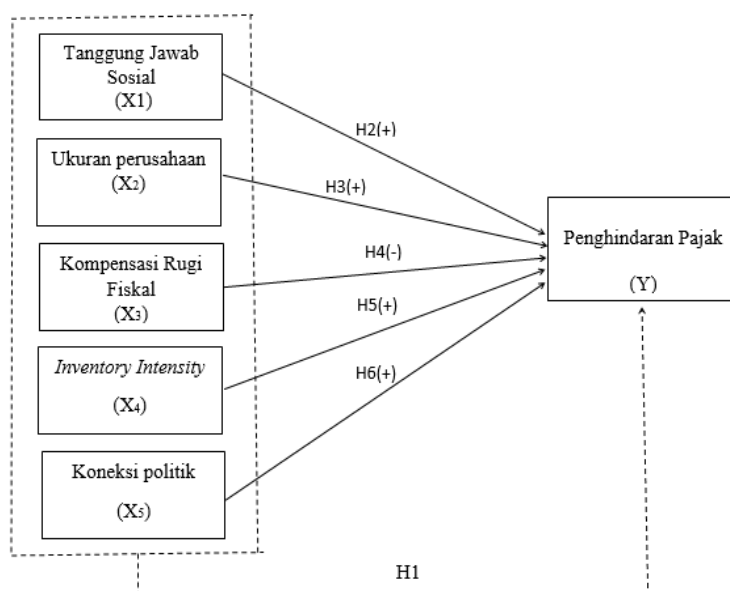
**H5:** Inventory Intensity berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

## Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan yang biasanya terdapat koneksi politik akan menerima perlakuan istimewa dari pemerintah menyangkut perizinan,ajuan pinjaman modal, dan berbagai jenis hak khusus yang dapat diperoleh oleh perusahaan yang mempunyai hubungan politik perlindungan dari pemerintah, akses yang mudah untuk mendapatkan hutang untuk ekuitas serta resiko akan pemeriksaan pajak rendah yang membuat perusahaan lebih agresif untuk melakukan perencanaan pajak yang membuat jumlah hutang pajak yang akan dipungut oleh pemungut pajak. Sehingga hal ini akan membuat perusahaan lebih berani dalam mengambil resiko, salah satunya mengenai praktik penghindaran pajak untuk mengurangi jumlah kewajiban perpajakannya (Rustiarini & Sudiartana, 2021).

Berdasarkan teori agensi apabila terjadi perbedaan keinginan antara principal dan ageint hal tersebut akan mengakibatkan terjadinya konflik yang dinamakan dengan ageincy probleim. Terdapat kewenangan yang dimiliki oleh dewan komisaris berupa pengawasan terhadap kinerja manajemen dengan manajemen mencatat apabila yang bersangkutan mempunyai indikasi melakukan aturan tindakan yang bertentangan dengan aturan yang dimiliki perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh (Petrawati, 2020) koneksi politik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Amalia & Ferdiansyah, 2019). Menindaklanjuti dari temuan banyak penelitian yang disebutkan diatas. Oleh karena itu, Sehingga hipotesis yang diajukan pada penelitian ini sebagai berikut:

**H6:** Koneksi politik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak



Gambar 1 Model Penelitian

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kausalitas eksplanatori, didalam penelitian (Lampengan et al., 2019) ini bahwa kausalitas eksplanatori adalah rumusan masalah penelitian yang bersifat menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih hubungan kausal yang bersifat sebab akibat. Penelitian ini terdapat variabel dependen penghindaran pajak (tax avoidance) menggunakan proksi Effeictivei Tax Ratei (ETR) (Choi & Park, 2022)., Sedangkan variabel idenpenden, tanggung jawab sosial (X1) Corporatei Social Reisponsibility diukur berdasarkan GRI VERSI 4 diukur CSRI (Firmansyah et al., 2022). Ukuran perusahaan (X2) dapat diukur logaritma natuiral (Ln) dari total aset (Choi & Park, 2022). Kompensasi rugi fiskal (X3) dapat diukur dummy dengan kompensasi rugi fiskal nilai 0 diberikan jika tidak terdapat, jika terdapat kompensasi rugi fiskal diberikan nilai 1 (Firmansyah et al., 2022). Inveintory inteinsity (X4) dapat diukur membandingkan total persediaan dibagi dengan total aset yang diprosikan dalam penelitian (Marlina et al., 2022). Variabel duimmy digunakan untuk mengukur hubungan politik (X5) (Firmansyah et al., 2022)

Populasi pada penelitian yang menggunakan perusahaan sub sektor pertambangan batu bara yang sudah terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022 dimana sudah melakukan publikasi laporan keuangan perusahaan, dengan demikian, populasi sampel dalam penelitian ini berjumlah 22 perusahaan. Kemudian, mempergunakan teknik non-probability sampling serta metode yang dipakai purposive sampling. Alasan penulis memakai teknik purposive sampling dikarenakan tak keseluruhan populasi bisa digunakan sebagai sampel pada penelitian yang dilakukan. Penelitian yang dilaksanakan mengambil data pada perusahaan pertambangan batu bara yang sudah terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2018 hingga tahun 2022. Penelitian ini dilakukan selama bulan juni 2023 sampai awal januari 2024.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif, pengujian hipotesis tradisional, uji F dan T, indeks kepastian R<sup>2</sup>, dan analisis regresi linier berganda. Data penelitian diproses dengan SPSS. Setelah memilih statistik deskriptif, peneliti mencoba asumsi klasik seperti normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi untuk meningkatkan pemahaman tentang data. Uji F menentukan kelayakan penelitian, sedangkan uji t menentukan apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Setiap variabel independen diperiksa secara terpisah dari variabel dependen melalui analisis regresi linier berganda, dan statistik R<sup>2</sup> digunakan untuk menghitung korelasi antara variabel independen dan dependen. Berikut ini adalah bentuk umum persamaan regresi linier:

$$EiTR = \alpha + \beta_1 CSR + \beta_2 UiP + \beta_3 KRF + \beta_4 INV + \beta_5 KP + e_i$$

Keterangan:

ETR	= Penghindaran pajak
$\alpha$	= Konstanta
$\beta_1 - \beta_5$	= Koefisien regresi
X1	= Tanggung jawab sosial
X2	= Ukuran perusahaan
X3	= Kompensasi Rugi Fiskal
X4	= Inveintory Inteinsity
X5	= Koneksi Politik
e	= Error

## 4. Hasil Penelitian

### Statistik Deskriptif

Jika dilihat dari tabel 6, total data (N) sebanyak 140 data. Dari hasil pengujian dibawah ini variabel tanggung jawab sosial diwakili CSRI yang dimodifikasi memiliki nilai minimum sebesar 0,20 di miliki PT. Transcoal Pacific Tbk 2019 dan nilai maksimal sebesar 0,78 yang dimiliki PT. Bumi Resources Tbk 2020 rata-rata variabel tanggung jawab sosial yaitu sebesar 0,4920 dengan standar deviasi yaitu 0,15689. Seberapa besar perusahaan dalam pengungkapan tanggung jawab sosial dilihat dengan laporan tahunan. Variabel ukuran perusahaan oleh Firm sizei total aset dengan nilai minimum 12,77 pada PT Atlas Resources Tbk 2018, dengan nilai maksimal 27.02 pada PT. Alfa Energi Investama Tbk 2019 dengan rata-rata 18,8815 dan standar deviasi 3,42309. Ukuran perusahaan proksi total aset dapat menggambarkan seberapa besar dan kecil perusahaan dan untuk kesinambungan antar periode. Variabel kompensasi rugi fiskal yang diwakili dengan duimmi yang memiliki nilai rata-rata 0,6273 yang artinya 62,73% perusahaan sektor pertambangan batu bara mengalami rugi fiskal yang mempunyai kesempatan untuk dikompensasi. kerugian fiskalnya dapat dikompensasikan untuk periode selanjutnya dimana kompensasi rugi fiskal tersebut dapat dimanfaatkan perusahaan dengan mengurangi kas yang harus dibayarkan dalam membayar pajaknya sehingga perusahaan tidak perlu lagi merencanakan pajaknya dengan menghindari pajak. Inveintory inteinsity diwakili INV yang dimodifikasikan memiliki nilai minimum 0,00 yang dimiliki oleh PT. Transcoal Pacific Tbk pada tahun 2018 dan maksimal sebesar 0,16 yang dimiliki PT. Bayan Resources Tbk ,rata-rata variabel inveintory inteinsity yaitu sebesar 0,0454 dengan standar deviasi yaitu 0,03380, inveintory inteinsity dapat menunjukkan seberapa efektif dan efisien perusahaan dalam mengatur invenstasinya dalam persediaan yang direfleksikan dalam beberapa kali persediaan itu diputar dalam satu periode tertentu. Variabel koneksi politik yang diwakili dengan duimmi yang memiliki nilai rata rata 0,7000 yang artinya 0,7% perusahaan sektor pertambangan batu bara miliki koneksi politik. Variabel penghindaran pajak yang diwakili oleh EiTR yang dimodifikasi memiliki nilai minimum 0,00 yang dimiliki oleh PT. Resource Alam Indonesia Tbk pada tahun 2018 dan nilai maksimum sebesar 26,31 yang dimiliki oleh PT. Delta Dunia Makmur pada tahun 2020 deangan standar deviasi sebesar 2,74108. Serta nilai rata-

rata sebesar 0,7561 yang artinya bahwa perbedaan nilai ini bisa disebabkan oleh seberapa besar proporsi pendapatan yang dihindarkan dari kewajiban pajak yang seharusnya. Semakin besar proporsi pendapatan yang dihindarkan, semakin besar potensi dampaknya terhadap pendapatan pajak yang diterima, rata-rata perusahaan sektor pertambangan batu bara tahun 2018-2022 melakukan praktik penghindaran pajak.

### **Uji Normalitas**

Dalam penelitian ini uji normalitas yang digunakan untuk memastikan normalitas data yang diteliti menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov (KS). Hasil pengujian dapat dikatakan normal jika nilai Asymp. Sig. (1-tailed) melebihi 0,05. Hasil uji normalitas setelah dilakukan pengeluaran data outlier sebanyak 65 data, sehingga data yang tersisa dalam sampel penelitian ini adalah 45. Pada tabel 7 menunjukkan nilai signifikan Asymp. Sig. (1-tailed) sebesar 0,200 yang artinya regresi linier tersebut layak untuk digunakan dalam penelitian ini, karena memiliki Asymp. Sig. (1-tailed) di atas 0,05.

### **Uji Multikolinearitas**

Untuk melihat apakah model regresi telah menemukan hubungan antara variabel bebas (independen), dilakukan uji multikolinearitas. Sebagai aturan praktis, multikolinearitas hadir jika VIF kurang dari 10 dan toleransi lebih dari 0,10, dan sebaliknya.

Karena nilai VIF (variance inflation factor) kurang dari 10, pada 1.413, dan nilai toleransi 0,707 lebih besar dari 0,10, multikolinearitas tidak ada dalam variabel tanggung jawab sosial seperti di tentukan oleh proksikan CSR. Karena nilai VIF (variance inflation factor) kurang dari 10, pada 2.358 dan nilai toleransi 0,424 lebih besar dari 0,10, multikolinearitas tidak terjadi untuk variabel ukuran perusahaan, seperti yang ditentukan oleh proksi total aset. Karena nilai VIF (variance inflation factor) kurang dari 10, pada 1.327, dan nilai toleransi 0,753 lebih besar dari 0,10, multikolinearitas tidak terjadi pada variabel kompensasi rugi fiskal seperti yang ditentukan oleh proxy Duimmy. Karena nilai VIF (variance inflation factor) kurang dari 10, pada 1.365, dan nilai toleransi 0,733 lebih besar dari 0,10, multikolinearitas tidak ada dalam variabel inventori intensitas seperti di tentukan oleh proxy INV. Karena nilai VIF (variance inflation factor) kurang dari 10, pada 2.457, dan nilai toleransi 0,407 lebih besar dari 0,10, multikolinearitas tidak terjadi pada variabel koneksi politik seperti yang ditentukan oleh proxy Duimmy. Dalam penelitian ini, tidak terjadi multikolinearitas, sebagaimana dibuktikan oleh nilai toleransi > 0,10 dan VIF 10, dan oleh karena itu model regresi dapat dipraktikkan.

### **Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji heteroskedastisitas bisa dilihat dari tidak adanya pola tertentu pada grafik. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan scatterplot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya ZRESID. Berikut adalah hasil dari uji heteroskedastisitas. Berdasarkan tabel 9 dapat dilihat bahwa titik-titik tersebut menyebar dan tidak membentuk suatu pola tertentu. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan.

### **Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t saat ini dan kesalahan t-1 sebelumnya dalam model regresi. Masalah autokorelasi terjadi ketika ada korelasi, dan dalam model regresi yang baik, tidak ada atau tidak ada korelasi sama sekali. Durbin Watson digunakan dalam penelitian ini. Hasil uji autokorelasinya sebagai berikut:

Pada tabel 10 Model summary dapat diperhitungkan apakah data mengalami autokorelasi. Pada tabel 11 menunjukkan nilai Durbin Watson sebesar 1.988 dengan jumlah variabel bebas (k) = 5 dan jumlah sampel (N) = 110, maka berdasarkan tabeli Durbin Watson diperoleh DL sebesar 1.5955 dan DU sebesar 1.7851. Dengan nilai DW = 1.988 sehingga  $dU < DW < 4-dU = 1.7851 < 1.988 < 2.2148$  sehingga dapat dikatakan bahwa data sampel yang ada aman dan tidak terdapat autokorelasi.

### **Uji Regresi Linier Berganda**

Pengaruh berbagai faktor independen terhadap variabel dependen dibandingkan dengan menggunakan uji regresi linier berganda. Persamaan linier dan tolok ukur digunakan. Banyak analisis regresi dapat digunakan untuk mengidentifikasi hubungan fungsional atau kausal antara beberapa variabel independen dan satu variabel dependen. Untuk keperluan analisis ini, persamaan berikut digunakan:

$$0,081ETR = 0,255 + 0,174CSR - 0,010UP + 0,001KRF - 0,527INV + 0,109KP + 0,079$$

Dari persamaan regresi berganda disimpulkan bahwa nilai konstanta ( $\alpha$ ) adalah sebesar 0.255. Memiliki arti bahwa variabel tanggung jawab sosial, ukuran perusahaan, kompensasi kerugian fiskal, inventory intensity, koneksi politik dalam keadaan tetap atau nol maka Penghindaran Pajak adalah sebesar 0.255. Koefisien variabel tanggung jawab sosial ( $\beta_1$ ). Berdasarkan perhitungan untuk pengaruh tanggung jawab sosial terhadap penghindaran pajak diperoleh koefisien sebesar 0.174, artinya jika nilai tanggung jawab sosial ditingkatkan sebesar 1, maka penghindaran pajaknya mengalami peningkatan sebesar 0,174. Koefisien variabel ukuran perusahaan ( $\beta_2$ ). Berdasarkan perhitungan untuk pengaruh ukuran terhadap penghindaran pajak diperoleh koefisien regresi sebesar 0.010, artinya jika nilai ukuran perusahaan ditingkatkan sebesar 1, maka penghindaran pajaknya mengalami penurunan sebesar 0.010. Koefisien variabel kompensasi kerugian fiskal ( $\beta_3$ ). Berdasarkan perhitungan untuk pengaruh kompensasi kerugian fiskal terhadap penghindaran pajak diperoleh koefisien sebesar 0.001, artinya jika nilai kompensasi kerugian fiskal ditingkatkan sebesar 1, maka penghindaran pajaknya mengalami penurunan sebesar 0,001. Koefisien variabel inventory intensity ( $\beta_4$ ). Berdasarkan perhitungan untuk pengaruh inventory intensity terhadap penghindaran pajak diperoleh koefisien sebesar 0,527, artinya jika nilai inventory intensity ditingkatkan sebesar 1, maka penghindaran pajaknya mengalami penurunan sebesar 0,527. Koefisien variabel koneksi politik Berdasarkan perhitungan untuk pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak diperoleh koefisien sebesar 0,109, artinya jika nilai koneksi politik ditingkatkan sebesar 1, maka penghindaran pajaknya mengalami peningkatan sebesar 0,109.

### Uji Hipotesis

#### Uji Simultan (Uji F)

Test F bertujuan untuk menguji apakah variabel-variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Jika p-value kurang dari 0,05, semua faktor independen berkorelasi signifikan dengan variabel dependen yang diuji. Penelitian ini menghasilkan model regresi yang dapat diterapkan dalam praktiknya. Hal ini ditunjukkan dengan data yang ditunjukkan dalam tabel 12. Anova memiliki tingkat signifikan 0,000. Penelitian ini menganggap H1 valid karena anova 0,000 lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, penghindaran pajak dipengaruhi secara bersamaan oleh tanggung jawab sosial, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, inventory intensity, koneksi politik.

#### Uji Parsial (Uji t)

Mengacu pada hasil tabel menunjukkan bahwa variabel tanggung jawab sosial, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, inventory intensity, dan koneksi politik menghasilkan nilai signifikan dibawah 0,05 yang berarti tanggung jawab sosial, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, inventory intensity, dan koneksi politik secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Terdapat nilai beta yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, inventory intensity tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dengan hasil negatif dan, sedangkan kompensasi rugi fiskal juga tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak namun dengan hasil positif. Kemudian tanggung jawab sosial dan koneksi politik berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dengan hasil positif.

Tabel 1 Uji Hipotesis

Hipotesis	Pernyataan	Hasil	Nilai $\beta$	Keputusan
H1	Tanggung jawab sosial, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, <i>inventory intensity</i> , koneksi politik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak	Sig 0.000 < 0.05	0,255	Diterima
H2	Tanggung jawab sosial berhubungan negatif terhadap penghindaran pajak	Sig 0.008 < 0.05	0,174	Diterima
H3	Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak	Sig 0,053 > 0.05	-0,010	Ditolak
H4	Kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak	Sig 0.150 < 0.05	0,594	Ditolak

H5	<i>Inventory intensity</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak	Sig 0.150 < 0.05	-0,594	Ditolak
H6	Koneksi politik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.	Sig 0,001 < 0,109	0,652	Diterima

### Uji Koefisien Determinasi (R2)

Pengujian ini pada tabel 15 hasil uji hasil pengolahan data dengan aplikasi SPSS versi 26. *summary model* (Darma, 2021) menunjukkan bahwa nilai yang disesuaikan dari koefisien determinasi yang ditunjukkan dengan nilai *adjusted R2* adalah 0,060 yang berarti atau sama dengan 60%. Persentase ini menunjukkan bahwa variabel tanggung jawab sosial, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, *inventory intensity* dan koneksi politik secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak sebesar 60% persen. Sedangkan sisanya (100% - 60% = 40%) dipengaruhi oleh variabel lain diluar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti. Contohnya: Profitabilitas, likuiditas, *Leveirage*, Sales Growth, ukuran dewan direksi, nilai perusahaan dan struktur modal.

## 5. Diskusi

### Pengaruh tanggung jawab sosial, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, *inventory intensity*, koneksi politik terhadap penghindaran pajak.

Aktivitas penghindaran pajak pada suatu perusahaan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pada penelitian ini penghindaran pajak dipengaruhi oleh tanggung jawab sosial, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, *inventory intensity*, dan koneksi politik secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil uji F menunjukkan tingkat signifikan sebesar 0,000, atau kurang dari 0,05, menunjukkan adanya potensi dampak bersama antara variabel independen dan variabel dependen. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa H1 diterima. Perusahaan dapat merencanakan atau mengatur biaya pajak yang harus dibayar seminimal mungkin yang dapat mengurangi laba perusahaan, Pemegang saham yang terlibat dalam manajemen perusahaan cenderung lebih berhati-hati untuk memenuhi kepentingan pribadi. perusahaan yang melaksanakan tanggung jawab sosial cenderung menjadi perhatian publik. Sehingga perusahaan yang melaksanakan tanggung jawab sosial akan menghindari tindakan yang merusak reputasi perusahaan.

Kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Setiap perusahaan yang mengalami kerugian dalam suatu periode dapat menggunakan kerugian tersebut untuk mengurangi utang pajak pada periode berikutnya. Dengan kata lain, perusahaan dapat mengatribusikan kerugian tersebut sebagai alasan untuk membayar lebih sedikit atau tidak membayar pajak di periode mendatang. Kompensasi rugi fiskal dapat menjadi alat yang berguna untuk mengurangi pajak. Ketika sebuah perusahaan mengalami kerugian dalam suatu periode, perusahaan dapat mencatat kerugian tersebut sebagai rugi fiskal, yang selanjutnya dapat digunakan untuk mengimbangi keuntungan dimasa depan. Dengan cara ini, perusahaan dapat mengurangi pendapatan kena pajak dan akibatnya mengurangi kewajiban pajak perusahaan.

*Inventory intensity* diukur menggunakan INV memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan bahwa intensitas persediaan yang tinggi akan mengalami penurunan laba dikarenakan beban tambahan yang timbul dari persediaan yang akan bertindak sebagai pengurang laba perusahaan yang secara langsung berpengaruh terhadap penghindaran ataupun penundaan pembayaran pajak.

Keterkaitan antara dunia politik dan perusahaan memberikan keunggulan bagi perusahaan dengan memberikan perlindungan dari pihak pemerintah, mempermudah proses perolehan pinjaman, dan mengurangi risiko pemeriksaan pajak manajemen menjadi lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan untuk menghindari pembayaran pajak yang lebih tinggi. Tindakan curang di perusahaan juga berpotensi menimbulkan konsekuensi bagi manajer. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Gulzar et al., 2018) dan (López-González et al., 2019), yang menunjukkan dampak positif yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak.

### **Pengaruh tanggung jawab sosial terhadap penghindaran pajak**

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial tingkat signifikan sebesar 0.008 yang berarti lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan H2 diterima. Semakin rendah pengungkapan tanggung jawab sosial akan semakin tinggi tingkat penghindaran pajak. Hal ini dapat terjadi karena perusahaan di Indonesia memiliki kesadaran untuk bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan. Membayar pajak salah satu cara perusahaan bertanggung jawab kepada lingkungan sosial. Dengan membayar pajak dengan penuh kesadaran dan sesuai dengan nominal yang ditetapkan, perusahaan juga telah membina hubungan yang baik dengan pemerintah. Selain itu, perusahaan yang melaksanakan tanggung jawab sosial cenderung menjadi perhatian publik. Sehingga perusahaan yang melaksanakan tanggung jawab sosial akan menghindari tindakan yang merusak reputasi perusahaan.

Hal ini sejalan dengan teori stakeholder, perusahaan tidak beraktivitas hanya untuk kepentingan pemegang sahamnya saja, perusahaan juga memiliki tanggung jawab kepada semua stakeholdernya seperti supplier, pemerintah, pekerja, masyarakat, konsumen, dan pihak-pihak lain yang terkena dampak kegiatan perusahaan. Salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan kepada stakeholder dengan membina hubungan baik dengan pemerintah. Hal ini bisa dilakukan melalui ketaatan perusahaan dalam membayar pajak dan tidak melakukan aktivitas penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian (Guilzar et al., 2018) dan (López-González et al., 2019) memiliki pengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak.

### **Pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak**

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan nilai signifikan 0.053, nilai tersebut lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan H3 ditolak sehingga menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa besar kecilnya suatu perusahaan tidak akan mempengaruhi penghindaran pajak. Perusahaan besar pasti akan menarik perhatian pemerintah sehingga akan dikenakan pajak sesuai aturan yang berlaku. Tidak berpengaruhnya variabel ukuran perusahaan dikarenakan membayar pajak yakni kewajiban bagi semua warga negara dan badan atau perusahaan. Perusahaan besar akan lebih mampu memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Perusahaan yang besar juga memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang panjang sehingga tidak perlu melakukan penghindaran pajak. Perusahaan juga tidak ingin merepotkan dengan proses pemeriksaan dan penerimaan sanksi yang berisiko karena menyebabkan citra perusahaan tersebut menjadi buruk pada perusahaan. Hasil ini tidak sejalan dengan (Mulyati et al., 2019) dan (Irawan, 2020). Namun sejalan dengan (Guilzar et al., 2018) yang menyatakan ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

### **Pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak**

Hasil pengujian kompensasi rugi fiskal pada penelitian ini setelah diuji menunjukkan nilai signifikan 0,963, nilai tersebut lebih besar dari 0,05 H4 ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan batu bara 2018-2022. Kompensasi rugi fiskal tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, perusahaan yang mengalami rugi diasumsikan tidak melakukan penghindaran pajak karena kerugiannya dapat dikompensasikan sehingga tidak perlu melakukan penghindaran pajak yang dapat berisiko terhadap reputasi perusahaan tersebut dan akan menjadi sorotan pemerintah. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian (Putri et al., 2019) yang menyatakan bahwa kompensasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

### **Pengaruh inventory intensity terhadap penghindaran pajak**

Inventory intensity mempunyai nilai signifikan 0,150 yang berarti lebih besar dari 0,05 dan nilai koefisien -0,594 yang artinya inventory intensity tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Maka hipotesis dari penelitian ini H5 ditolak. Hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki persediaan yang tinggi akan mendapatkan biaya-biaya tambahan yang dapat mengurangi laba perusahaan, dengan tingginya biaya tambahan tersebut maka laba perusahaan akan mengecil dan beban pajak akan sesuai dengan situasi perusahaan, sehingga dapat disimpulkan bahwa biaya tambahan yang timbul akibat bertambahnya persediaan tidak dapat dimanfaatkan untuk mengurangi pajak. Hal ini tidak sejalan dengan temuan (Chandra, 2021) tetapi sejalan dengan temuan (Ahdiyah & Triyanto, 2021) menyatakan bahwa inventory intensity tidak memiliki pengaruh berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

## **Pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak**

Berdasarkan hasil uji menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh positif 0.109 dengan tingkat signifikan sebesar 0.004 yang berarti lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan H6 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan pertambangan batu bara yang mayoritas dimiliki oleh orang-orang yang berkepentingan dipemerintahan memiliki pengaruh kuat untuk melakukan potensi penghindaran pajak. Semakin banyak koneksi politik pada perusahaan maka semakin tinggi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Setiap perusahaan berusaha membangun koneksi politik yang kuat dengan cara menempatkan pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan pemerintah, sehingga memiliki akses terhadap skruktur pemerintahan atau yang memiliki kekuasaan politik. Ini karena perusahaan akan memiliki resiko deteksi yang rendah sebab politisi atau penguasa akan memberikan perlindungan terhadap perusahaan tersebut. Hal ini karena koneksi politik yang dimiliki perusahaan dimanfaatkan dengan adanya meloby yang bersifat menekan otoritas pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayar maupun untuk memperkecil hukuman apabila metode penghindaran pajak yang dilakukan terungkap melanggar peraturan perpajakan.

Namun kedekatan yang dimiliki perusahaan membuat perusahaan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk tetap mendapatkan apresiasi dari pemerintah sebagai wajib pajak yang patuh. Sehingga mendorong perusahaan untuk selalu mengikuti berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Hal ini sejalan dengan temuan (Rustiari & Sudiartana, 2021) dan (Firmansyah et al., 2022) yang menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

## **6. Kesimpulan, Saran, dan Keterbatasan Penelitian**

### **Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan pembahasan sebelumnya dan pengujian yang telah dilakukan untuk menguji hubungan yang terjalin antara kelima variabel dan subsektor pertambangan batu bara dan periode waktu yang diteliti. Tanggung jawab sosial, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, inventori intensitas dan koneksi politik secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Tanggung jawab sosial di proksikan jumlah item yang diungkapkan dibagi dengan jumlah seluruh item indikator pengungkapan perusahaan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Karena perusahaan pertambangan batu bara memiliki kesadaran untuk bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan, membayar pajak salah satu cara perusahaan bertanggung jawab kepada lingkungan sosial. Ukuran perusahaan yang diproksikan total aset berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Tidak berpengaruhnya variabel ukuran perusahaan dikarenakan membayar pajak kewajiban bagi semua warga negara dan badan atau perusahaan. Kompensasi rugi fiskal diproksikan duimmy secara parsial tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan yang mengalami rugi diasumsikan tidak melakukan penghindaran pajak karena kerugiannya dapat dikompensasikan sehingga tidak perlu melakukan penghindaran pajak yang dapat berisiko terhadap reputasi perusahaan tersebut dan akan menjadi sorotan pemerintah. Inventori intensitas yang diproksikan total persediaan dibagi total aset perusahaan tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini karena biaya tambahan yang timbul akibat bertambahnya persediaan tidak dapat dimanfaatkan untuk mengurangi pajak. Koneksi politik yang diproksikan duimmy secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak semakin banyak perusahaan yang memiliki koneksi politik maka akan semakin tinggi penghindaran, karena koneksi politik yang dimiliki perusahaan dimanfaatkan dengan adanya meloby yang bersifat menekan otoritas pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayar maupun untuk memperkecil hukuman apabila metode penghindaran pajak yang dilakukan terungkap melanggar peraturan perpajakan. Namun kedekatan direksi dan komisaris dengan pemerintah yang dimiliki perusahaan membuat perusahaan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk tetap mendapatkan apresiasi dari pemerintah sebagai wajib pajak yang patuh.

### **Keterbatasan Penelitian dan Saran**

Penelitian ini banyak menemukan keterbatasan seperti analisis data yang dilakukan menggunakan perusahaan pertambangan batu bara saja dan tidak mengikutsertakan perusahaan lain. Dilihat dari kemampuan variabel independen dalam menjelaskan varians variabel terkait (dependen) pada model penelitian hanya sebesar 60% Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar variasi dalam praktik penghindaran pajak mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diselidiki dalam penelitian ini. terbatasi oleh beberapa faktor, seperti durasi waktu yang diperlukan untuk menemukan laporan keuangan setiap perusahaan, keperluan untuk melakukan pemrosesan data, dan analisis data, yang melibatkan

pengecualian data spesifik dari analisis guna menguji model regresi dalam pemeriksaan normalitas atau asumsi klasik.

Penelitian selanjutnya diinginkan dapat menggunakan variabel independen lain agar bisa lebih mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penghindaran pajak seperti likuiditas, komite audit, sales growth, profitabilitas, komisaris independen, Leiveirage, ukuran dewan direksi, nilai perusahaan dan struktur modal. dan diharapkan peneliti selanjutnya dapat menggunakan sampel dengan rentang waktu yang lebih panjang. Penelitian berikutnya sebaiknya melibatkan sub-sektor perusahaan yang berbeda, seperti sektor multinational, keuangan, farmasi, real estate, makanan dan minuman dan sektor lainnya, guna mendapatkan gambaran yang lebih tentang perilaku penghindaran pajak.

Bagi perusahaan diharapkan agar lebih jujur dan taat pada peraturan perpajakan serta bijaksana dalam menyusun laporan keuangannya agar tidak terindikasi melakukan penghindaran pajak yang menyebabkan kerugian negara sekaligus berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Bagi pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diharapkan dapat menyempurnakan peraturan ataupun meningkatkan pengawasan terkait tindakan penghindaran pajak agar meminimalisasi perusahaan-perusahaan memanfaatkan celah (loopholeis dan greiy areia) peraturan perpajakan. Hal ini mengingat dalam kelima penelitian ini variabel tanggung jawab sosial, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, inventory inteinsity, dan koneksi politik berpengaruh terhadap tindak penghindaran pajak.

Bagi investor, untuk mempertimbangkan hal seperti perpajakan sebelum melakukan investasi di perusahaan dengan melihat apakah perusahaan tersebut sudah membayar pajak sesuai dengan yang sudah ditetapkan dan menjalankan sistem tata kelola dengan baik agar perusahaan tersebut memiliki sejarah perusahaan yang baik, yang pada akhirnya para investor dapat berinvestasi dengan tepat. Kemudian untuk perusahaan, penting untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut sudah mematuhi semua peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan cara tidak melanggar UU perpajakan, sehingga perusahaan memiliki nilai yang baik dimata pemerintah dan masyarakat.

## Referensi

- Ahdiyah, A., & Triyanto, D. N. (2021). Impact of Financial Distress, Firm Size, Fixed Asset Intensity, and Inventory Intensity on Tax Aggressiveness. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 4(2), 49–59.
- Alsmady, A. A. (2023). The effect of political connection on corporate tax avoidance: The moderating role of accounting information quality. *Journal of Governance and Regulation*, 12(1, special issue), 333–347. <https://doi.org/10.22495/jgrv12i1siart12>
- Amalia, D., & Ferdiansyah, S. (2019). Does Political Connection, Executive Character, and Audit Quality Affect the Tax Avoidance Practice? Evidence in Indonesia. *Sebelas Maret Business Review*, 4(2), 93. <https://doi.org/10.20961/smbr.v4i2.35905>
- Anggraini, P., & Wahyudi, I. (2022). Pengaruh Reputasi Perusahaan, Environmental, Social and Governance dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 643–649. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i2.2120>
- Baker, G., Caves, R., Chamberlain, G., Di, R., Khanna, T., Mullainathan, S., Rivkin, J., Schorr, J., Stern, J., & Timmer, P. (1997). *Estimating the Value of Political Connections*.
- Bowen, H. R. (1953). *Social Responsibilities of the Businessman*. University of Iowa Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctt20q1w8f>
- Chang, Y.-S., Kim, M.-S., Lee, K. M., & Cho, D. H. (1987). The Effects of Human Resource Management on Organizational Effectiveness. *Journal of the Korea Industrial Information Systems Research*, 19(3), 103–114. <https://doi.org/10.9723/jksis.2014.19.3.103>
- Choi, J., & Park, H. (2022). Tax Avoidance, Tax Risk, and Corporate Governance: Evidence from Korea. *Sustainability*, 14(1), 469. <https://doi.org/10.3390/su14010469>
- Darma, B. (2021). *Statistika Penelitian Menggunakan SPSS (Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Regresi Linier Sederhana, Regresi Linier Berganda, Uji t, Uji F, R2)*. Guepedia.
- Fernández-Rodríguez, E., & Martínez-Arias, A. (2012). Do Business Characteristics Determine an Effective Tax Rate? *The Chinese Economy*, 45(6), 60–83. <https://doi.org/10.2753/CES1097-1475450604>

- Firmansyah, A., Arham, A., Qadri, R. A., Wibowo, P., Irawan, F., Kustiani, N. A., Wijaya, S., Andriani, A. F., Arfiansyah, Z., Kurniawati, L., Mabrur, A., Dinarjito, A., Kusumawati, R., & Mahrus, M. L. (2022). Political connections, investment opportunity sets, tax avoidance: does corporate social responsibility disclosure in Indonesia have a role? *Heliyon*, 8(8), 10155. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10155>
- Firmansyah, A., & Estutik, R. S. (2020). Environmental responsibility performance, corporate social responsibility disclosure, tax aggressiveness: Does corporate governance have a role? *Journal of Governance and Regulation*, 9(4), 8–24. <https://doi.org/10.22495/jgrv9i4art1>
- Fisher, M. R., & Baumol, W. J. (1962). Business Behavior, Value and Growth. *The Economic Journal*, 72(287), 708. <https://doi.org/10.2307/2228457>
- Freeman, R. E., & Veal, J. M. (2001). *A stakeholder Approach to Strategic Management*. 77(6), 671–677.
- Goerke, L. (2019). Corporate social responsibility and tax avoidance. *Journal of Public Economic Theory*, 21(2), 310–331. <https://doi.org/10.1111/jpet.12341>
- Gulzar, M. A., Cherian, J., Sial, M., Badulescu, A., Thu, P., Badulescu, D., & Khuong, N. (2018). Does Corporate Social Responsibility Influence Corporate Tax Avoidance of Chinese Listed Companies? *Sustainability*, 10(12), 4549. <https://doi.org/10.3390/su10124549>
- Handayani, S., & Ivena, F. (2022). Pengaruh Inventory Intensity, Leverage, dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *JACFA Journal Advancement Center for Finance and Accounting*, 86–102.
- Hermanto, H., & Dewinta, A. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Efisiensi Perusahaan, Likuiditas, Kekuatan Pasar, Pertumbuhan Perusahaan Dan Leverage Terhadap Profitabilitas. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(2), 846–871. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i2.3060>
- Irawan, F. (2020). The Effect of Tax Avoidance on Firm Value with Tax Risk as Moderating Variable. *Engineering & Management Journal*, 83(9696), 9696–9707.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Economic Analysis of the Law*, 305, 162–176.
- Kementrian Republik Indonesia. (2020). *Ini Aturan Baru PPh dan PPN dalam RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Kemenkeu.Go.Id. <https://www.kemenkeu.go.id/Publikasi/Berita/Ini-Aturan-Baru-Pph-Dan-Ppn-Dalam-Ruu-Harmonisasi-peraturan-Perpajakan/>
- Lampengan, P., Massie, J. D., & Roring, F. (2019). The Influence of Motivation, Trust and Consumer Attitudes on the Buying Interest of Zalora Online Shop Users on Students of the Faculty of Economics and Business, Unsrat Manado. *Emba*, 7(4), 5693–5703.
- Lee, J., Kim, S., & Kim, E. (2021). Designation as the Most Admired Firms to the Sustainable Management of Taxes: Evidence from South Korea. *Sustainability*, 13(14), 1–17. <https://doi.org/10.3390/su13147994>
- Lestari, J., & Solikhah, B. (2019). The Effect of CSR, Tunneling Incentive, Fiscal Loss Compensation, Debt Policy, Profitability, Firm Size to Tax Avoidance. *Accounting Analysis Journal*, 8(1), 31–37. <https://doi.org/10.15294/aaj.v8i1.23103>
- López-González, E., Martínez-Ferrero, J., & García-Meca, E. (2019). Does corporate social responsibility affect tax avoidance: Evidence from family firms. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 26(4), 819–831. <https://doi.org/10.1002/csr.1723>
- Marlina, E., Hasanudin, A. I., & Mulyasari, W. (2022). Tax Aggressiveness: The Role of Capital Intensity and Inventory Intensity with Leverage as Intervening. *Journal of Applied Business, Taxation and Economics Research*, 1(6), 614–632. <https://doi.org/10.54408/jabter.v1i6.97>
- Mauren, J., & Purwaningsih, E. (2022). Pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kompetensi komite

- audit terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(7), 2003–2005.
- Mohammad, Z. (2008). *Manajemen perpajakan*. Penerbit Salemba Empat.
- Mulyati, Y., Subing, H. J. T., Fathonah, A. N., & Prameela, A. (2019). Effect of profitability, leverage and company size on tax avoidance. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 6(8), 26–35.
- Nugrahadi, E. W., & Rinaldi, M. (2021). The Effect of Capital Intensity and Inventory Intensity on Tax Avoidance at Food and Beverage Subsector Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). *Proceedings of the International Conference on Strategic Issues of Economics, Business and, Education*, 221–225. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210220.039>
- Putri, R. T., Ulum, I., & Prasetyo, A. (2019). Company Risk, Size, Fiscal Loss Compensation, and Tax Avoidance: Evidence from Indonesian Islamic Companies. *Journal of Innovation in Business and Economics*, 2(2), 87. <https://doi.org/10.22219/jibe.v2i02.7323>
- Rustiarini, N. W., & Sudiartana, I. M. (2021). Board Political Connection and Tax Avoidance: Ownership Structure as A Moderating Variable. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 8(2), 128–144. <https://doi.org/10.24815/jdab.v8i2.20760>
- Septanta, R. (2023). The Influence of Institutional Ownership, Managerial Ownership, and Fiscal Loss Compensation on Tax Avoidance. *Scientific Journal Of Reflection : Economic, Accounting, Management and Business*, 6(1), 95–104. <https://doi.org/10.37481/sjr.v6i1.623>
- Sihono, A., & Febyansyah, A. (2023). Tax Avoidance dan Tax Risk: Peran Moderasi dari Corporate Governance. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 7(1), 1–16. <https://doi.org/10.18196/rabin.v7i1.16631>
- Tanzil, M., & Arrozi, M. F. (2020). Analisis Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Latar Belakang Keahlian Komite Audit, Komisaris Independen, Struktur Kepemilikan Saham Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Dengan Variabel Kontrol Ukuran dan Kinerja Perusahaan. *JCA Ekonomi*, 1(1), 180–195.
- Yuniar, A., & Saputra, W. A. (2022). Pengaruh pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Cakung. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(4), 1738–1745. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i4.2601>
- Zeng, T. (2019). Relationship between corporate social responsibility and tax avoidance: international evidence. *Social Responsibility Journal*, 15(2), 244–257. <https://doi.org/10.1108/SRJ-03-2018-0056>
- Zimmerman, J. L. (1983). Taxes And Firm Size. *Journal of Accounting and Economics*, 5, 119–149.